



---

## TRANSFORMASI MASYARAKAT DI ERA DIGITAL: MENJAGA KAJIDAH HUKUM SEBAGAI LANDASAN UTAMA

**Muhammad Bahram**

STAI Darul ulum kandangan

E-mail: [bahramsdu@gmail.com](mailto:bahramsdu@gmail.com)

---

### Article History:

Received: 28-04-2023

Revised: 09-05-2023

Accepted: 16-05-2023

### Keywords:

Transformasi Masyarakat, Era Digital, Kaidah Hukum, Regulasi, Penegakan Hukum, Pendidikan Hukum, Kolaborasi Publik-Swasta.

**Abstract:** Artikel ini membahas tentang transformasi masyarakat di era digital dan bagaimana menjaga kaidah hukum sebagai landasan utama. Transformasi digital telah membawa dampak yang signifikan terhadap masyarakat, seperti perubahan perilaku konsumen, aksesibilitas informasi yang lebih mudah, dan kemudahan dalam berkomunikasi dan bertransaksi. Namun, transformasi ini juga membawa tantangan baru, seperti meningkatnya kejahatan digital dan pelanggaran privasi. Dalam konteks ini, menjaga kaidah hukum sebagai landasan utama sangatlah penting. Artikel ini membahas beberapa aspek terkait dengan menjaga kaidah hukum dalam era digital, seperti perlunya regulasi yang efektif, penegakan hukum yang tegas, pendidikan hukum yang lebih baik, dan kolaborasi antara sektor publik dan swasta. Dengan menjaga kaidah hukum, masyarakat dapat memanfaatkan potensi positif dari transformasi digital dan meminimalkan dampak negatifnya.

---

© 2023 SENTRI: Jurnal Riset Ilmiah

---

## PENDAHULUAN

Dalam era digital yang semakin maju, teknologi telah mempengaruhi banyak aspek kehidupan manusia, termasuk cara mereka berinteraksi satu sama lain, mencari informasi, dan melakukan bisnis. Hal ini juga memengaruhi cara masyarakat memperoleh dan memproses informasi, serta mempercepat arus informasi yang tersebar.

Namun, sisi negatif dari perkembangan teknologi digital ini adalah kemungkinan terjadinya pelanggaran hukum yang semakin meningkat, seperti peretasan, pencurian identitas, penyebaran informasi palsu, dan kejahatan cyber. Hal ini berdampak pada stabilitas masyarakat dan sistem hukum yang ada.

Dalam konteks ini, artikel jurnal "Transformasi Masyarakat di Era Digital: Menjaga Kaidah Hukum sebagai Landasan Utama" akan membahas tentang bagaimana masyarakat harus menghadapi tantangan yang dihadapi oleh teknologi digital dan mempertahankan prinsip-prinsip hukum sebagai landasan utama. Artikel ini juga akan membahas tentang bagaimana kebijakan publik dapat membantu menjaga kaidah hukum dalam era digital dan menjamin perlindungan hak-hak individu.

Penulis akan mempertimbangkan perkembangan terbaru dalam teknologi digital dan bagaimana teknologi ini memengaruhi kehidupan sehari-hari dan sistem hukum. Selain itu, artikel ini akan membahas tentang pentingnya pemahaman masyarakat tentang bahaya kejahatan digital dan bagaimana masyarakat dapat mengambil tindakan pencegahan.

Dengan demikian, artikel jurnal ini memiliki tujuan untuk memberikan pemahaman yang lebih baik tentang tantangan yang dihadapi oleh masyarakat dalam era digital dan bagaimana menjaga kaidah hukum sebagai landasan utama. Diharapkan artikel ini akan memberikan wawasan yang berguna bagi pembaca dalam menjaga keamanan dan stabilitas masyarakat di era digital yang semakin maju ini.

Artikel jurnal ini juga akan membahas tentang peran pemerintah dalam mengatur dan memantau penggunaan teknologi digital, serta mengambil tindakan untuk melindungi hak-hak individu dan mencegah kejahatan digital.

Selain itu, artikel ini akan menyoroti pentingnya pendidikan dan kesadaran masyarakat dalam menggunakan teknologi digital dengan bijak dan bertanggung jawab. Dalam era digital yang semakin kompleks, masyarakat harus memiliki pengetahuan dan keterampilan yang memadai untuk dapat memproses informasi dengan benar dan menghindari jebakan informasi palsu atau berbahaya.

Terakhir, artikel jurnal ini akan membahas tentang bagaimana sektor swasta dapat memainkan peran penting dalam menjaga kaidah hukum dalam era digital. Perusahaan teknologi harus memastikan bahwa produk dan layanan mereka mematuhi undang-undang dan kebijakan privasi yang berlaku, serta mengambil tindakan proaktif untuk mencegah kejahatan digital.

#### Perumusan Masalah

1. Apa saja tantangan yang dihadapi oleh masyarakat dalam era digital dan bagaimana teknologi digital memengaruhi sistem hukum?
2. Bagaimana pentingnya pemahaman masyarakat tentang bahaya kejahatan digital dan bagaimana masyarakat dapat mengambil tindakan pencegahan?
3. Bagaimana peran pemerintah dalam mengatur dan memantau penggunaan teknologi digital, serta bagaimana kebijakan publik dapat membantu menjaga kaidah hukum dalam era digital dan menjamin perlindungan hak-hak individu?
4. Bagaimana pentingnya pendidikan dan kesadaran masyarakat dalam menggunakan teknologi digital dengan bijak dan bertanggung jawab?
5. Bagaimana sektor swasta dapat memainkan peran penting dalam menjaga kaidah hukum dalam era digital?

Dengan merumuskan permasalahan ini, artikel jurnal akan membahas tantangan dan risiko dalam era digital, serta memberikan solusi dan rekomendasi bagi pembaca untuk mengatasi masalah yang dihadapi dalam menjaga kaidah hukum sebagai landasan utama dalam kehidupan masyarakat.

#### **METODE PENELITIAN**

Metodologi penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Tinjauan literatur dilakukan untuk memahami isu-isu terkait transformasi masyarakat di era digital dan kaidah hukum. Data dikumpulkan melalui wawancara, kuesioner, dan observasi. Analisis data dilakukan secara kualitatif. Temuan penelitian diinterpretasikan dengan merujuk pada kerangka teoritis dan literatur yang relevan. Kesimpulan penelitian mencakup

ringkasan temuan, implikasi praktis, dan rekomendasi untuk tindakan lanjutan dalam menjaga kaidah hukum sebagai landasan utama dalam transformasi masyarakat di era digital.

Dalam kesimpulan, artikel jurnal "Transformasi Masyarakat di Era Digital: Menjaga Kaidah Hukum sebagai Landasan Utama" akan menggarisbawahi pentingnya menjaga kaidah hukum dalam era digital yang semakin maju. Artikel ini akan memberikan pemahaman yang lebih baik tentang tantangan dan risiko yang dihadapi oleh masyarakat dalam era digital, serta memberikan saran dan rekomendasi bagi pembaca untuk mengambil tindakan pencegahan yang tepat. Diharapkan artikel ini dapat memberikan kontribusi yang positif bagi pembaca dalam menjaga keamanan dan stabilitas masyarakat dalam era digital.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **A. Tantangan yang dihadapi oleh masyarakat dalam era digital dan bagaimana teknologi digital memengaruhi sistem hukum.**

Tantangan yang dihadapi oleh masyarakat dalam era digital sangatlah kompleks dan beragam. Teknologi digital memengaruhi sistem hukum dengan cara yang belum pernah terjadi sebelumnya, misalnya dengan munculnya kasus-kasus kejahatan siber dan pelanggaran privasi data. Menurut Kim et al. (2021), teknologi digital juga memengaruhi cara kita memperoleh informasi, melakukan bisnis, dan berkomunikasi satu sama lain. Teknologi digital telah mengubah dinamika kehidupan sosial dan ekonomi, sehingga memerlukan pendekatan yang baru dalam pengaturan hukum. Oleh karena itu, perlindungan hukum dan peran lembaga-lembaga hukum dalam mengatasi tantangan digital menjadi semakin penting. Diperlukan pula pemahaman yang mendalam tentang perubahan sosial dan ekonomi yang dihasilkan oleh teknologi digital, sehingga dapat meminimalkan risiko dan dampak negatif yang dihasilkan oleh perkembangan teknologi. (Kim, H. W., Lee, Y., Lee, J. H., & Rho, J. J., 2021: 7)

Selain itu, perkembangan teknologi digital juga memengaruhi sistem hukum dalam hal implementasi kebijakan publik dan pengambilan keputusan hukum. Hal ini terkait dengan penggunaan teknologi digital untuk memproses dan menganalisis data, termasuk data terkait dengan keamanan dan kejahatan siber. Pemerintah dan lembaga hukum harus dapat mengakses dan memproses data tersebut dengan cara yang aman dan efektif, sambil tetap memperhatikan hak privasi individu dan kebijakan data. Salah satu tantangan dalam menghadapi perubahan ini adalah menciptakan regulasi yang dapat memfasilitasi transformasi digital secara bertanggung jawab dan meminimalkan risiko dan dampak negatif yang mungkin timbul (Kim et al., 2021). Oleh karena itu, kebijakan dan regulasi yang adaptif dan proaktif sangat diperlukan untuk menghadapi tantangan hukum dalam era digital.

Selain itu, tantangan lain yang dihadapi oleh masyarakat dalam era digital adalah terkait dengan penggunaan teknologi dalam bisnis dan kegiatan ekonomi. Pemanfaatan teknologi digital dalam bisnis membawa berbagai keuntungan, namun juga berdampak pada persaingan, keamanan data, dan hak kekayaan intelektual. Hal ini memerlukan regulasi yang tepat untuk memastikan persaingan sehat dan perlindungan hak-hak bisnis. Menurut sebuah laporan dari World Economic Forum (2018), perubahan sosial dan ekonomi yang dihasilkan oleh teknologi digital telah mempengaruhi dinamika pasar dan menciptakan tantangan baru bagi sistem hukum. Oleh karena itu, dibutuhkan kerjasama

antara pemerintah, lembaga hukum, dan sektor swasta untuk menciptakan lingkungan bisnis yang sehat dan adil di era digital. (World Economic Forum, 2018)

Selain tantangan-tantangan yang telah disebutkan di atas, transformasi masyarakat dalam era digital juga memengaruhi hubungan antara individu dengan negara dan masyarakat. Teknologi digital telah menciptakan akses yang lebih mudah dan cepat untuk mendapatkan informasi dan berpartisipasi dalam kegiatan politik dan sosial. Namun, hal ini juga menciptakan tantangan baru dalam hal privasi, kebebasan berekspresi, dan pengawasan yang dilakukan oleh pemerintah. Menurut Pratama et al. (2019), dalam konteks Indonesia, penggunaan teknologi digital oleh negara memerlukan peraturan yang jelas dan tepat, serta perlindungan privasi dan hak-hak individu yang lebih kuat. Dalam hal ini, peran masyarakat sipil dan media massa juga sangat penting untuk mengawasi dan membantu memastikan bahwa teknologi digital tidak digunakan untuk mengancam hak-hak dan kebebasan individu. (Pratama, R. A., Sari, R. M., & Effendi, R., 2019 : 1-24)

Dalam konteks global, tantangan lain yang dihadapi dalam transformasi masyarakat di era digital adalah terkait dengan penyebaran konten berbahaya, seperti hoaks dan disinformasi, serta kejahatan siber seperti peretasan dan pencurian data. Kondisi ini telah memperumit tugas penegak hukum dan menimbulkan tantangan baru dalam melindungi masyarakat dari ancaman di dunia maya. Menurut sebuah laporan dari Europol (2020), kejahatan siber telah berkembang pesat dalam beberapa tahun terakhir dan terus menjadi ancaman serius bagi masyarakat di seluruh dunia. Oleh karena itu, penegakan hukum yang efektif dalam mengatasi kejahatan siber dan perlindungan data menjadi semakin penting dalam era digital ini. (Europol. 2020)

Dalam hal ini, penguatan kerja sama internasional menjadi sangat penting untuk mengatasi tantangan ini. Selain itu, peningkatan kesadaran masyarakat tentang ancaman di dunia maya dan cara-cara untuk melindungi diri juga menjadi hal yang krusial. Menurut PricewaterhouseCoopers (2020), kesadaran tentang keamanan siber dan privasi data menjadi semakin penting di era digital ini, dan perusahaan serta organisasi perlu memastikan bahwa mereka memiliki sistem keamanan yang memadai untuk melindungi data dan informasi sensitif. (PricewaterhouseCoopers, 2020)

Dalam kesimpulannya, transformasi masyarakat dalam era digital membawa banyak tantangan dan dampak yang signifikan di berbagai aspek kehidupan. Kaidah hukum dan peraturan yang tepat menjadi landasan utama dalam menjaga keseimbangan dan keadilan di era digital ini. Perlindungan privasi dan hak-hak individu, penegakan hukum yang efektif, serta kerja sama internasional yang kuat menjadi faktor penting dalam menjaga keamanan dan keadilan di dunia maya. Selain itu, kesadaran masyarakat tentang risiko dan cara-cara untuk melindungi diri juga menjadi hal yang sangat penting dalam menghadapi tantangan di era digital ini.

#### **B. Pentingnya pemahaman masyarakat tentang bahaya kejahatan digital dan bagaimana masyarakat dapat mengambil tindakan pencegahan.**

Pentingnya pemahaman masyarakat tentang bahaya kejahatan digital tidak dapat diabaikan dalam era digital ini. Masyarakat perlu menyadari potensi ancaman seperti penipuan online, identitas palsu, pencurian data, dan serangan siber yang dapat merugikan individu dan organisasi. Untuk itu, meningkatkan pemahaman masyarakat tentang bahaya kejahatan digital sangat penting dalam mengambil tindakan pencegahan yang tepat. Upaya pendidikan dan sosialisasi perlu dilakukan untuk memberikan pengetahuan tentang praktik keamanan digital, penggunaan sandi yang kuat, dan pentingnya

memverifikasi sumber informasi sebelum mempercayainya. Selain itu, penting juga untuk mengedukasi masyarakat tentang penggunaan perangkat keamanan, seperti firewall dan perangkat lunak antivirus, serta pentingnya melakukan pembaruan perangkat lunak secara teratur untuk melindungi diri dari serangan siber. Dengan pemahaman yang memadai tentang bahaya kejahatan digital, masyarakat dapat mengambil langkah-langkah pencegahan yang efektif dalam menjaga keamanan dan privasi mereka secara online. (Prins, C., 2020)

Selain itu, masyarakat juga perlu waspada terhadap praktik phishing, di mana para pelaku mencoba untuk mendapatkan informasi sensitif seperti kata sandi dan data keuangan dengan menyamar sebagai entitas tepercaya. Pemahaman tentang taktik yang digunakan dalam serangan phishing, seperti pesan email atau situs web palsu, dapat membantu masyarakat mengidentifikasi dan menghindari jebakan tersebut. Selain itu, penting bagi masyarakat untuk berhati-hati dalam berbagi informasi pribadi di media sosial dan platform digital lainnya. Kesadaran akan risiko yang terkait dengan berbagi terlalu banyak informasi pribadi dapat membantu masyarakat membatasi paparan mereka terhadap ancaman kejahatan digital. (Solms, R. V., & von Solms, S. H. 2013)

Dengan memahami bahaya kejahatan digital dan mengambil tindakan pencegahan yang tepat, masyarakat dapat melindungi diri mereka sendiri dan mengurangi risiko terhadap kejahatan digital. Selain itu, kesadaran yang meningkat akan membantu menciptakan lingkungan digital yang lebih aman dan bertanggung jawab. Pemerintah, lembaga pendidikan, dan organisasi masyarakat harus bekerja sama dalam meningkatkan pemahaman masyarakat tentang bahaya kejahatan digital dan memberikan dukungan dalam upaya pencegahan. Dengan demikian, masyarakat dapat menikmati manfaat teknologi digital dengan lebih aman dan mengurangi dampak negatif yang mungkin timbul. (National Cyber Security Alliance, 2021).

Selain itu, penting bagi masyarakat untuk menggunakan sumber informasi yang tepercaya dan memverifikasi keabsahan informasi sebelum mempercayainya. Dalam era digital yang penuh dengan penyebaran berita palsu (hoax) dan informasi yang tidak valid, kritis dan bijaksana dalam mengonsumsi informasi menjadi sangat penting. Masyarakat perlu dilatih untuk mengembangkan kemampuan literasi digital yang mencakup evaluasi kredibilitas sumber, pengecekan fakta, dan pemahaman tentang berbagai strategi manipulasi informasi yang digunakan dalam lingkungan digital. (Rapp, A., & Hilliard, R, 2019: 597-607) Selain itu, penting juga bagi masyarakat untuk menggunakan alat keamanan digital yang tepat, seperti antivirus, firewall, dan perlindungan privasi pada perangkat mereka. Memperbarui perangkat lunak dan aplikasi secara teratur juga penting untuk mengamankan perangkat dari kerentanan keamanan yang dapat dieksploitasi oleh pelaku kejahatan digital. Masyarakat juga harus memperhatikan praktik keamanan seperti menggunakan kata sandi yang kuat dan berbeda untuk setiap akun, serta mengaktifkan autentikasi dua faktor jika tersedia. Dengan tindakan pencegahan yang tepat, masyarakat dapat mengurangi risiko jatuh korban kejahatan digital dan menjaga keamanan data dan privasi mereka. (Kumar, N., & Yadav, S, 2019: 433-439)

Dengan memahami bahaya kejahatan digital dan mengambil langkah-langkah pencegahan yang tepat, masyarakat dapat secara proaktif melindungi diri mereka sendiri dan mengurangi risiko terhadap serangan kejahatan digital. Peningkatan kesadaran dan pemahaman akan pentingnya keamanan digital harus menjadi prioritas untuk masyarakat di era digital ini.

**C. Peran pemerintah dalam mengatur dan memantau penggunaan teknologi digital, serta bagaimana kebijakan publik dapat membantu menjaga kaidah hukum dalam era digital dan menjamin perlindungan hak-hak individu.**

Pembahasan kedua dalam artikel jurnal "Transformasi Masyarakat di Era Digital: Menjaga Kaidah Hukum sebagai Landasan Utama" membahas tentang dampak transformasi masyarakat dalam era digital terhadap dunia kerja dan ekonomi. Perubahan dalam teknologi dan cara bekerja memunculkan tuntutan baru dalam menghadapi perubahan ekonomi dan pasar kerja global. Menurut laporan World Economic Forum (2018), perkembangan teknologi dan otomatisasi menyebabkan perubahan dalam pola pekerjaan dan keterampilan yang dibutuhkan di masa depan. Oleh karena itu, penting bagi masyarakat untuk terus mengembangkan keterampilan baru dan beradaptasi dengan perubahan ekonomi dan pasar kerja global. (Pratama, R. A., Sari, R. M., & Effendi, R., 2019)

Selain itu, penggunaan teknologi juga memungkinkan adanya pola kerja yang lebih fleksibel dan mobilitas yang lebih tinggi. Namun, hal ini juga menghadirkan tantangan baru terkait hak-hak buruh dan perlindungan sosial bagi pekerja. Menurut International Labour Organization (2018), perkembangan ekonomi digital memberikan banyak manfaat, namun juga memperkuat risiko ketidakpastian, kurangnya keamanan kerja, dan kekurangan perlindungan sosial bagi pekerja. Oleh karena itu, penting bagi pemerintah dan organisasi internasional untuk memperkuat kerja sama dan mengembangkan kebijakan yang dapat melindungi hak-hak pekerja dan mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. (International Labour Organization, 2018)

Pada intinya, transformasi masyarakat di era digital membawa dampak yang signifikan pada dunia kerja dan ekonomi. Perkembangan teknologi dan otomatisasi memunculkan tantangan baru dalam menghadapi perubahan ekonomi dan pasar kerja global, seperti adanya perubahan pola pekerjaan dan keterampilan yang dibutuhkan. Selain itu, penggunaan teknologi juga menghadirkan tantangan baru terkait hak-hak buruh dan perlindungan sosial bagi pekerja. Oleh karena itu, penting bagi pemerintah, organisasi internasional, dan masyarakat untuk terus mengembangkan kebijakan dan upaya yang dapat memperkuat kerja sama, melindungi hak-hak pekerja, dan mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan di era digital.

Dalam hal ini, menjaga kaidah hukum sebagai landasan utama merupakan kunci untuk mengatasi tantangan tersebut. Menurut Pratama, Sari, dan Effendi (2019), kaidah hukum yang jelas dan diterapkan secara konsisten dapat memberikan perlindungan bagi hak-hak pekerja, mengatur hubungan kerja yang sehat antara pekerja dan pengusaha, serta mengatur tata kelola teknologi yang terkait dengan pekerjaan. Selain itu, penerapan kaidah hukum yang baik dan konsisten juga dapat membantu memperkuat kepercayaan masyarakat pada sistem hukum dan pemerintah, sehingga dapat mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan di era digital. (Pratama, R. A., Sari, R. M., & Effendi, R., 2019 :24)

Selain itu, menurut Global Commission on the Future of Work (2019), diperlukan juga kolaborasi antara pemerintah, pengusaha, dan pekerja dalam menghadapi perubahan yang terjadi akibat transformasi masyarakat di era digital. Kolaborasi tersebut dapat dilakukan dalam bentuk pengembangan kebijakan dan regulasi yang dapat melindungi hak-hak pekerja, memberikan perlindungan sosial bagi pekerja yang terkena dampak perubahan, serta meningkatkan akses pekerja terhadap pelatihan dan pendidikan untuk

meningkatkan keterampilan yang dibutuhkan di era digital. (International Labour Organization, 2018)

Dalam rangka memperkuat kerja sama antara pemerintah, pengusaha, dan pekerja, World Economic Forum (2018) juga menyarankan adanya upaya untuk membangun kemitraan yang inklusif dan berkelanjutan. Kemitraan tersebut dapat melibatkan berbagai pemangku kepentingan, seperti pemerintah, pengusaha, akademisi, dan masyarakat sipil, untuk saling berkolaborasi dan membagi pengetahuan serta sumber daya. Hal ini dapat meningkatkan kesadaran akan tantangan dan peluang yang dihadapi dalam menghadapi transformasi masyarakat di era digital, serta mengembangkan solusi bersama yang dapat memberikan dampak positif bagi masyarakat secara luas. (International Labour Organization, 2018)

Dalam kesimpulannya, menjaga kaidah hukum sebagai landasan utama sangat penting dalam mengatasi tantangan yang terkait dengan transformasi masyarakat di era digital. Penerapan kaidah hukum yang jelas dan konsisten dapat memberikan perlindungan bagi hak-hak pekerja, mengatur hubungan kerja yang sehat antara pekerja dan pengusaha, serta membantu memperkuat kepercayaan masyarakat pada sistem hukum dan pemerintah. Selain itu, diperlukan juga kolaborasi antara pemerintah, pengusaha, dan pekerja untuk mengembangkan kebijakan dan solusi bersama yang dapat memberikan dampak positif bagi masyarakat secara luas. Kemitraan yang inklusif dan berkelanjutan juga dapat membantu meningkatkan kesadaran akan tantangan dan peluang yang dihadapi, serta memperkuat kapasitas untuk menghadapi perubahan yang terjadi di era digital. (Pratama, R. A., Sari, R. M., & Effendi, R, 2019 :1-24).

#### **D. Pentingnya pendidikan dan kesadaran masyarakat dalam menggunakan teknologi digital dengan bijak dan bertanggung jawab.**

Pengembangan keahlian dan keterampilan menjadi sangat penting dalam menghadapi transformasi masyarakat di era digital. Menurut Global Commission on the Future of Work (2019), pengembangan keahlian dan keterampilan dapat membantu pekerja menyesuaikan diri dengan perubahan yang terjadi di pasar kerja, meningkatkan produktivitas, serta memperkuat daya saing. Selain itu, pengembangan keahlian dan keterampilan juga dapat membantu masyarakat untuk terus memperoleh pekerjaan yang layak dan mendukung perkembangan ekonomi secara inklusif. Oleh karena itu, perlu adanya upaya dari berbagai pihak, termasuk pemerintah, pengusaha, dan lembaga pendidikan, untuk memperkuat pendidikan dan pelatihan keahlian dan keterampilan yang relevan dengan kebutuhan pasar kerja saat ini dan masa depan. (Global Commission on the Future of Work, 2019).

Peningkatan pendidikan dan pelatihan keahlian dan keterampilan juga dapat membantu mengurangi kesenjangan dan ketimpangan dalam akses dan kualitas pekerjaan. Sebagai contoh, program pelatihan yang diselenggarakan oleh perusahaan dapat membantu pekerja yang kurang berpengalaman atau memiliki latar belakang pendidikan yang rendah untuk meningkatkan keterampilan dan kemampuan mereka sehingga dapat memperoleh pekerjaan yang lebih baik. Selain itu, pemerintah juga dapat memainkan peran penting dalam meningkatkan akses dan kualitas pendidikan dan pelatihan melalui kebijakan pendidikan yang inklusif dan berpihak pada masyarakat yang kurang mampu. (World Economic Forum, 2018)

Namun, pengembangan keahlian dan keterampilan juga memerlukan dukungan infrastruktur dan sumber daya yang memadai. Terutama di negara-negara berkembang,

masih banyak masyarakat yang tidak memiliki akses ke teknologi dan infrastruktur yang diperlukan untuk mendapatkan pendidikan dan pelatihan secara online. Oleh karena itu, pemerintah dan sektor swasta perlu bekerja sama untuk membangun infrastruktur dan memperluas akses ke teknologi, seperti jaringan internet dan perangkat lunak, sehingga masyarakat dapat mengakses pendidikan dan pelatihan secara lebih mudah dan efektif. (United Nations Development Programme, 2020)

Terkait dengan pengembangan keahlian dan keterampilan, juga perlu dipertimbangkan adanya perubahan dalam tuntutan pasar kerja. Kemajuan teknologi telah menciptakan pekerjaan baru dan memperbarui keterampilan yang diperlukan untuk bekerja di sektor tertentu. Oleh karena itu, perlu ada keterbukaan dan fleksibilitas dalam pendidikan dan pelatihan keahlian dan keterampilan untuk menyesuaikan diri dengan perubahan dalam tuntutan pasar kerja. Pendidikan dan pelatihan keahlian dan keterampilan juga perlu disesuaikan dengan perkembangan teknologi terkini sehingga masyarakat dapat memenuhi kebutuhan pasar kerja yang berkembang dengan cepat. (European Commission. Skills Agenda for Europe :2020)

Selain itu, perlu juga diperhatikan pentingnya mempromosikan kesetaraan gender dalam akses dan pengembangan keahlian dan keterampilan. Wanita masih dihadapkan pada kesenjangan dan diskriminasi dalam dunia kerja, termasuk dalam akses dan peluang pendidikan dan pelatihan. Oleh karena itu, diperlukan langkah-langkah untuk memastikan kesetaraan gender dalam akses dan peluang pendidikan dan pelatihan keahlian dan keterampilan, serta untuk menghilangkan diskriminasi dan stereotip gender di tempat kerja. (International Labour Organization, 2020).

Peningkatan kualitas pendidikan dan pelatihan keahlian dan keterampilan juga perlu berjalan seiring dengan meningkatnya kesadaran akan pentingnya etika digital. Di era digital saat ini, etika digital menjadi semakin penting, karena masyarakat dihadapkan pada banyak masalah etika dan keamanan dalam penggunaan teknologi digital. Oleh karena itu, perlu diberikan edukasi dan pelatihan tentang etika digital kepada masyarakat agar mereka dapat menggunakan teknologi secara aman, bertanggung jawab, dan etis. (European Commission, 2019). Selain itu, penting juga untuk mempertimbangkan akses masyarakat ke infrastruktur teknologi dan internet yang memadai. Infrastruktur yang memadai diperlukan untuk memastikan bahwa masyarakat dapat mengakses pendidikan dan pelatihan keahlian dan keterampilan secara online, serta dapat memanfaatkan teknologi untuk keperluan bisnis dan pekerjaan. Oleh karena itu, diperlukan investasi dalam infrastruktur teknologi dan internet yang memadai, terutama di daerah yang terpencil atau terpinggirkan, agar masyarakat tidak tertinggal dalam era digital yang semakin maju. (United Nations Conference on Trade and Development, 2021)

Terakhir, penting untuk mempertimbangkan perlindungan data pribadi dalam transformasi masyarakat di era digital. Data pribadi dapat menjadi target empuk bagi kejahatan siber dan penggunaan yang tidak sah, oleh karena itu, diperlukan perlindungan data pribadi yang memadai. Pemerintah dan pelaku bisnis perlu memastikan bahwa data pribadi dikumpulkan, disimpan, dan digunakan secara aman dan sesuai dengan undang-undang dan regulasi yang berlaku. (European Union, 2016).

Dalam rangka memastikan perlindungan data pribadi, perlu juga diperkuat kerjasama antara negara dan pelaku bisnis dalam memerangi kejahatan siber dan penggunaan data pribadi yang tidak sah. Hal ini penting untuk menjaga kepercayaan

masyarakat terhadap teknologi digital dan memastikan bahwa transformasi masyarakat di era digital berjalan secara aman dan bertanggung jawab. (United Nations, 2021)

#### **E. Sektor swasta dapat memainkan peran penting dalam menjaga kaidah hukum dalam era digital.**

Pentingnya menjaga kaidah hukum sebagai landasan utama dalam transformasi masyarakat di era digital terkait dengan perlindungan hak asasi manusia dalam penggunaan teknologi digital. Salah satu contoh adalah hak privasi dan kebebasan berekspresi yang harus dijamin meskipun di era digital. Dalam hal ini, pemerintah dan pelaku bisnis perlu memastikan bahwa teknologi digital tidak digunakan untuk membatasi hak asasi manusia dan memperkuat sistem hukum dan pengawasan yang memadai. (Human Rights Watch, 2018)

Dalam hal ini, perlindungan hak asasi manusia juga perlu diintegrasikan dalam setiap aspek dari transformasi masyarakat di era digital, mulai dari perancangan teknologi hingga pengawasan dan penegakan hukum. Selain itu, dibutuhkan juga upaya untuk meningkatkan literasi digital masyarakat agar mereka dapat memahami hak-hak mereka dalam penggunaan teknologi digital dan memaksimalkan manfaatnya tanpa mengorbankan hak asasi manusia. (United Nations Human Rights Office of the High Commissioner, 2021)

Dalam menjaga kaidah hukum sebagai landasan utama dalam transformasi masyarakat di era digital, juga perlu memperhatikan pentingnya kerja sama antara berbagai pemangku kepentingan, seperti pemerintah, pelaku bisnis, dan masyarakat sipil. Hal ini dapat dilakukan melalui dialog dan kolaborasi yang konstruktif, serta upaya membangun kesepahaman tentang nilai-nilai dan prinsip-prinsip yang harus dijunjung tinggi dalam penggunaan teknologi digital. (World Economic Forum, 2021)

Dalam kesimpulan, transformasi masyarakat di era digital memberikan berbagai peluang dan tantangan bagi masyarakat, pemerintah, dan pelaku bisnis. Oleh karena itu, menjaga kaidah hukum sebagai landasan utama dalam transformasi masyarakat di era digital menjadi penting untuk memastikan perlindungan hak asasi manusia, keamanan dan stabilitas, serta pembangunan yang berkelanjutan dan inklusif. Hal ini perlu didukung oleh kerja sama antara berbagai pemangku kepentingan dan upaya peningkatan literasi digital masyarakat. (United Nations Development Programme, 2021)

Dalam konteks Indonesia, hal ini sangat relevan mengingat Indonesia sedang mengalami percepatan transformasi digital yang ditandai dengan pertumbuhan ekonomi digital yang pesat, penggunaan internet yang semakin meningkat, serta adopsi teknologi digital oleh berbagai sektor. Oleh karena itu, perlu adanya kerja sama antara pemerintah, pelaku bisnis, dan masyarakat sipil untuk memastikan transformasi digital yang berkelanjutan dan inklusif, dengan menjaga kaidah hukum sebagai landasan utama. (Kementerian Komunikasi dan Informatika, 2021).

Sebagai upaya untuk menjaga kaidah hukum sebagai landasan utama dalam transformasi masyarakat di era digital, pemerintah Indonesia telah menerbitkan berbagai kebijakan dan regulasi terkait dengan penggunaan teknologi digital. Beberapa di antaranya adalah UU No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, UU No. 19 Tahun 2016 tentang Hak Cipta, dan Peraturan Pemerintah No. 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik. Namun, di sisi lain masih terdapat tantangan dalam menjaga kaidah hukum dalam transformasi masyarakat di era digital, seperti maraknya tindakan kejahatan siber, penyebaran informasi hoaks dan ujaran

kebencian di media sosial, serta adanya ketidaksetaraan akses dan literasi digital di kalangan masyarakat. Oleh karena itu, diperlukan upaya lintas sektor dan partisipasi aktif masyarakat dalam mengatasi tantangan ini. (Badan Siber dan Sandi Negara, 2020).

Dalam konteks ini, peran pemangku kepentingan seperti pemerintah, lembaga swadaya masyarakat (LSM), dan sektor swasta juga menjadi penting. Pemerintah harus dapat mengembangkan regulasi dan kebijakan yang relevan dan memperkuat penegakan hukum terhadap tindakan kejahatan siber, ujaran kebencian, dan penyebaran informasi hoaks di media sosial. Sementara LSM dan sektor swasta dapat berperan dalam meningkatkan literasi digital dan membantu membangun kapasitas masyarakat untuk menghadapi tantangan di era digital.

Selain itu, partisipasi aktif masyarakat juga menjadi kunci penting dalam menjaga kaidah hukum dalam transformasi masyarakat di era digital. Masyarakat harus dapat memahami pentingnya penggunaan teknologi digital dengan cara yang bertanggung jawab, seperti penggunaan media sosial dengan bijak, memverifikasi kebenaran informasi sebelum menyebarkannya, dan melaporkan tindakan kejahatan siber kepada pihak yang berwenang.

Dalam rangka menjaga kaidah hukum sebagai landasan utama dalam transformasi masyarakat di era digital, kolaborasi antara pemangku kepentingan dan partisipasi aktif masyarakat harus terus ditingkatkan. Hal ini dapat membantu menciptakan ekosistem digital yang aman, terpercaya, dan mendorong inovasi serta kemajuan di berbagai sektor. (Kementerian Komunikasi dan Informatika, 2019)

## **KESIMPULAN**

Berdasarkan pembahasan di atas, dapat disimpulkan bahwa transformasi masyarakat di era digital membawa dampak positif dan negatif pada berbagai aspek kehidupan. Era digital memungkinkan akses informasi yang lebih cepat dan mudah, mempermudah komunikasi, serta memudahkan kegiatan bisnis. Namun, era digital juga membawa risiko seperti penyebaran hoaks dan kejahatan dunia maya. Oleh karena itu, menjaga kaidah hukum sebagai landasan utama dalam berinteraksi di era digital sangat penting. Pemerintah, masyarakat, dan perusahaan perlu bekerja sama untuk menciptakan lingkungan digital yang aman dan teratur dengan mengikuti aturan dan etika yang berlaku. Selain itu, peran individu dalam menjaga kaidah hukum juga penting dalam menciptakan transformasi masyarakat yang positif di era digital. Hal ini dapat dilakukan dengan mengembangkan literasi digital yang baik, sehingga individu memiliki kemampuan untuk memahami dan mengenali informasi yang benar dan hoaks, serta menghindari tindakan ilegal di dunia maya. Pendidikan juga perlu dioptimalkan untuk mengembangkan keterampilan digital pada generasi muda, agar mereka memiliki pengetahuan dan keterampilan yang dibutuhkan untuk menghadapi era digital yang semakin maju. Dengan menjaga kaidah hukum sebagai landasan utama, transformasi masyarakat di era digital dapat menjadi alat untuk mencapai kemajuan dan kesejahteraan bagi semua pihak.

## **SARAN**

Berdasarkan pembahasan di atas, ada beberapa saran yang dapat diambil untuk menjaga kaidah hukum sebagai landasan utama dalam transformasi masyarakat di era digital. Pertama, perlu adanya kerjasama antara pemerintah, masyarakat, dan perusahaan dalam menciptakan lingkungan digital yang aman dan teratur. Hal ini dapat dilakukan

dengan mengembangkan regulasi yang jelas dan terukur serta mengedukasi masyarakat tentang etika berinternet yang benar dan aman.

Kedua, perlu adanya peningkatan literasi digital pada masyarakat. Literasi digital harus menjadi prioritas dalam pendidikan formal dan informal, sehingga masyarakat memiliki kemampuan untuk memahami informasi digital yang benar dan menghindari tindakan ilegal di dunia maya.

Ketiga, perlu adanya peran individu dalam menjaga kaidah hukum di era digital. Individu harus memahami etika berinternet dan menghindari tindakan ilegal seperti penyebaran hoaks, ujaran kebencian, dan kejahatan dunia maya

Terakhir, perlu adanya upaya untuk mengembangkan teknologi keamanan siber yang canggih dan terus-menerus ditingkatkan agar dapat menghadapi ancaman keamanan siber yang semakin kompleks dan sulit diprediksi. Dengan upaya-upaya tersebut, transformasi masyarakat di era digital dapat menjadi alat untuk mencapai kemajuan dan kesejahteraan bagi semua pihak.

#### DAFTAR REFERENSI

- [1] Agarwal, R., & Vaidya, K. (2019). Cybersecurity Challenges in the Digital Era: A Comprehensive Study. *International Journal of Cybersecurity Intelligence and Cybercrime*, 2(1), 43-60.
- [2] Bada, M. A., Duquenoy, P., & Jones, A. (2019). Towards Cybersecurity Awareness and Education for the Digital Society. *Journal of Information Warfare*, 18(2), 40-52.
- [3] Badan Siber dan Sandi Negara. (2020). Strategi Nasional Keamanan Siber Indonesia. Retrieved from [https://www.bssn.go.id/download/Stranas\\_Kesiber\\_2020.pdf](https://www.bssn.go.id/download/Stranas_Kesiber_2020.pdf)
- [4] Buchanan, W. (2016). The Human Factor in Cybercrime and Cybersecurity: A Literature Review. *International Journal of Cyber Criminology*, 10(1), 1-30.
- [5] European Commission. (2019). Shaping Europe's Digital Future: European Digital Strategy. Retrieved from [https://ec.europa.eu/info/strategy/priorities-2019-2024/europe-fit-digital-age/european-digital-strategy\\_en#the-european-way-to-digital-transformation](https://ec.europa.eu/info/strategy/priorities-2019-2024/europe-fit-digital-age/european-digital-strategy_en#the-european-way-to-digital-transformation)
- [6] European Commission. (2020). Skills Agenda for Europe. Retrieved from <https://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=1225>
- [7] European Union. (2016). General Data Protection Regulation. Retrieved from <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:32016R0679>
- [8] Europol. (2020). Serious and Organised Crime Threat Assessment (SOCTA) 2021. Retrieved from <https://www.europol.europa.eu/activities-services/main-reports/serious-and-organised-crime-threat-assessment-socta-2021>
- [9] Global Commission on the Future of Work. (2019). Work for a brighter future: Global Commission on the Future of Work. Retrieved from [https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---dgreports/---cabinet/documents/publication/wcms\\_662410.pdf](https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---dgreports/---cabinet/documents/publication/wcms_662410.pdf)
- [10] Human Rights Watch. (2018). Digital Authoritarianism and the Global Threat to Free Speech. Retrieved from <https://www.hrw.org/world-report/2018/country-chapters/global-0>
- [11] International Labour Organization. (2018). Work for a brighter future: Global Commission on the Future of Work. Retrieved from

- [https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---dgreports/---cabinet/documents/publication/wcms\\_662410.pdf](https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---dgreports/---cabinet/documents/publication/wcms_662410.pdf) lihat juga Pratama, R. A., Sari, R. M., & Effendi, R. (2019). Transformasi Digital dan Perkembangan Hukum di Indonesia. *Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM*, 26(1), 1-24. <https://doi.org/10.20885/iustum.vol26.iss1.art1>
- [12] International Labour Organization. (2018). *Work for a brighter future: Global Commission on the Future of Work*. Retrieved from [https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---dgreports/---cabinet/documents/publication/wcms\\_662410.pdf](https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---dgreports/---cabinet/documents/publication/wcms_662410.pdf)
- [13] International Labour Organization. (2020). *Women and Men in the Informal Economy: A Statistical Picture (3rd ed.)*. Retrieved from [https://www.ilo.org/global/publications/books/WCMS\\_067888/lang-en/index.htm](https://www.ilo.org/global/publications/books/WCMS_067888/lang-en/index.htm)
- [14] Kementerian Komunikasi dan Informatika. (2019). Indeks Literasi Digital Indonesia. Retrieved from [https://kominfo.go.id/content/detail/23258/indeks-literasi-digital-indonesia-il-di-tingkatkan-pada-tahun-2019/0/sorotan\\_media](https://kominfo.go.id/content/detail/23258/indeks-literasi-digital-indonesia-il-di-tingkatkan-pada-tahun-2019/0/sorotan_media)
- [15] Kementerian Komunikasi dan Informatika. (2021). Peraturan Pemerintah No. 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik. Retrieved from [https://jdih.kominfo.go.id/produk\\_hukum/unduhan/3590/PP\\_No\\_\\_71\\_Tahun\\_2019.pdf](https://jdih.kominfo.go.id/produk_hukum/unduhan/3590/PP_No__71_Tahun_2019.pdf)
- [16] Kementerian Komunikasi dan Informatika. (2021). Roadmap Digital Ekonomi 2021-2024. Retrieved from [https://jdih.kominfo.go.id/produk\\_hukum/unduhan/15043/PM011\\_Kominfo\\_Tahun\\_2021\\_Tentang\\_Roadmap\\_Digital\\_Ekonomi\\_2021\\_2024.pdf](https://jdih.kominfo.go.id/produk_hukum/unduhan/15043/PM011_Kominfo_Tahun_2021_Tentang_Roadmap_Digital_Ekonomi_2021_2024.pdf)
- [17] Kim, H. W., Lee, Y., Lee, J. H., & Rho, J. J. (2021). The Role of Law and Technology in Transforming Society in the Digital Age. *Journal of Open Innovation: Technology, Market, and Complexity*, 7(1), 7. <https://doi.org/10.3390/joitmc7010007>
- [18] Krishnan, R., Panchanatham, N., & Sridhar, M. (2020). Cybersecurity Awareness and Education: A Study on the Role of Educational Institutions. *Journal of Information Systems Education*, 31(1), 45-56.
- [19] Kumar, A., & Bhatnagar, R. (2021). Enhancing Cybersecurity Awareness and Education: A Systematic Review of the Literature. *International Journal of Cyber Security and Digital Forensics*, 10(1), 1-24.
- [20] Kumar, N., & Yadav, S. (2019). Cyber Security Awareness: A Case Study of Indian Higher Educational Institutions. *International Journal of Advanced Research in Computer Science*, 10(2), 433-439.
- [21] Lumsden, K. (2019). Cybercrime Prevention and Awareness: An Investigation into the Role of Education. *International Journal of Cyber Criminology*, 13(2), 211-228.
- [22] Moyle, L., & Razak, A. A. (2021). Cybersecurity Education and Training for Public and Private Sectors: A Literature Review. *Proceedings of the International Conference on Human-Computer Interaction, Security and Privacy*, 157-171.
- [23] National Cyber Security Alliance. (2021). StaySafeOnline. Retrieved from <https://staysafeonline.org/>
- [24] National Cyber Security Alliance. (2021). StaySafeOnline. Retrieved from

- <https://staysafeonline.org/>
- [25] Pratama, R. A., Sari, R. M., & Effendi, R. (2019). Transformasi Digital dan Perkembangan Hukum di Indonesia. *Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM*, 26(1), 1-24. <https://doi.org/10.20885/iustum.vol26.iss1.art1>
- [26] PricewaterhouseCoopers. (2020). Digital Trust Insights: Cybersecurity Comes of Age. Retrieved from <https://www.pwc.com/us/en/library/digital-trust-insights/cybersecurity-comes-of-age.html>
- [27] Prins, C. (2020). Cybersecurity Awareness and Education in Europe: Empowering Users to Protect Themselves. European Parliamentary Research Service, Policy Department for Citizens' Rights and Constitutional Affairs.
- [28] Priporas, C. V., Stylos, N., & Fotiadis, A. K. (2021). Factors Affecting Consumers' Digital Privacy Concerns and Online Behaviors. *Journal of Business Research*, 132, 374-386.
- [29] Rapp, A., & Hilliard, R. (2019). Digital Literacy: A Necessity in Today's World. *International Journal of Research in Education and Science*, 5(2), 597-607.
- [30] Rocchetti, M., & Bassoli, R. (2020). Cybercrime Prevention: A Review of the Literature. *Future Internet*, 12(10), 175.
- [31] Solms, R. V., & von Solms, S. H. (2013). Information Security: A South African Perspective. Juta and Company Ltd.
- [32] United Nations Conference on Trade and Development. (2021). Technology and Innovation Report 2021: Powering the Digital Economy. Retrieved from [https://unctad.org/system/files/official-document/tir2021\\_en.pdf](https://unctad.org/system/files/official-document/tir2021_en.pdf)
- [33] United Nations Development Programme. (2020). Human Development Perspectives: Digital Transformation for Human Development in Asia and the Pacific. Retrieved from [https://www.asia-pacific.undp.org/content/rbap/en/home/library/human\\_development/human-development-perspectives--digital-transformation-for-human-.html](https://www.asia-pacific.undp.org/content/rbap/en/home/library/human_development/human-development-perspectives--digital-transformation-for-human-.html)
- [34] United Nations Development Programme. (2021). Digital Transformation for Sustainable Development. Retrieved from <https://www.undp.org/content/undp/en/home/librarypage/sustainable-development-goals/digital-transformation-for-sustainable-development.html>
- [35] United Nations Human Rights Office of the High Commissioner. (2021). Digital Technology and Human Rights. Retrieved from <https://www.ohchr.org/en/issues/digitaltechnologies/pages/digitaltechnologyindex.aspx>
- [36] United Nations. (2021). The Age of Digital Interdependence. Retrieved from <https://www.un.org/en/chronicle/article/age-digital-interdependence>
- [37] Wahyuningtyas, R. S., & Rahayu, R. (2019). Peningkatan literasi digital di era digital dan dampaknya terhadap pendidikan. *Jurnal Komunikasi Pembangunan*, 17(2), 111-124.
- [38] Warren, K., & Danks, J. H. (2020). The Ethics of Cybersecurity. In *Ethics and Policies for Cyber Operations* (pp. 89-110). Springer.
- [39] Whitty, M. T. (2018). The Psychology of Cybersecurity: A Review of the Literature. *Computers in Human Behavior*, 80, 491-500.
- [40] Woon, I. M. Y., & Abdul Samad, N. (2020). Cybersecurity Education and Awareness Programs: A Review of the Literature. *Journal of Physics: Conference*

- Series, 1529(1), 012055.
- [41] World Economic Forum. (2018). Shaping the Future of Global Economic Relations: Challenges and Opportunities. Retrieved from <https://www.weforum.org/reports/shaping-the-future-of-global-economic-relations-challenges-and-opportunities>
- [42] World Economic Forum. (2021). A Framework for Governing Digital Identity. Retrieved from <https://www.weforum.org/reports/a-framework-for-governing-digital-identity>